

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan dari kegiatan bisnis suatu perusahaan adalah mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan oleh seluruh jajaran komisaris dan manajemen pada awal pendiriannya. Salah satu tujuan dari suatu organisasi perusahaan adalah mengamankan aset perusahaan untuk menjamin kepastian akan terhindarnya dari kewajiban yang tidak diharapkan, diperlukan adanya suatu pengendalian intern agar dapat mencegah terjadinya berbagai kendala yang akan terjadi, tercapainya efisiensi operasional dan mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pihak manajemen.

Bank merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan yang memiliki kegiatan bisnis yang kompleks, terutama pada kegiatan operasional bank sehari-hari. Seiring dengan semakin kompleksnya operasional bank, maka *top management* memiliki keterbatasan dalam mengawasi segala aspek kegiatan operasionalnya, oleh karena itu diperlukan suatu sistem agar dapat membantu *top management* dalam mengawasi serta memudahkan jalannya kegiatan operasional yang baik dan sehat. Keefektifan suatu prosedur yang dibuat oleh pihak manajemen masih belum sepenuhnya dijalankan baik oleh staf dan *low management* sehingga sering ditemukannya kecurangan seperti pencurian, pemalsuan, penggelapan dan lain sebagainya.

Bank memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dari berbagai kegiatannya mulai dari kegiatan kredit dan kegiatan operasionalnya yaitu dapat menjalankan kegiatan operasional bank yang sehat dan aman serta peningkatan layanan terhadap kenyamanan nasabah bertransaksi. Seluruh kegiatan bank harus direncanakan dengan baik, akan tetapi pada praktiknya masih terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian yang dilakukan dengan sengaja oleh sebagian karyawan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank. Kekeliruan dan ketidaksesuaian tersebut merupakan bentuk dari adanya kecurangan yang meliputi kelemahan, kesalahan, dan penggelapan. Kelemahan mengindikasikan kondisi atau keadaan yang bukan seharusnya terjadi termasuk sistem yang tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Kesalahan (*errors*) menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan secara tidak disengaja dan adanya ketidakbenaran (*irregularities*) yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan penggelapan merupakan suatu usaha menyembunyikan kesalahan dengan tujuan menipu pihak lain. Hal-hal seperti ini sering kali dilakukan dari pihak intern bank yang telah mengenal seluk beluk dari pekerjaannya dan menemukan celah untuk terjadinya kesalahan.

Fraud merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa dan sangat sering kita temukan baik di negara berkembang maupun negara maju. *Fraud* dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengabaikan serta melanggar segala peraturan yang ada (Festi, dkk., 2014). *Fraud* bukan hanya terjadi di sektor organisasi yang berorientasi pada profit saja melainkan sektor pemerintahan pun juga tak luput dari oknum yang melakukan *fraud*.

Fraud merupakan istilah generik yang di dalamnya merangkum bagaimana kecerdikan manusia bisa merancang untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari pihak lain dengan keterangan palsu (Albrecht, dkk., 2012:6). *Fraud* didefinisikan sebagai penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan yang dilakukan dengan maksud jahat. Berkaitan dengan pelaporan keuangan, *fraud* diartikan sebagai salah saji yang disengaja dari pelaporan keuangan (Arens, dkk., 2012:336).

Beberapa kondisi di lingkungan kerja yang dapat menjadi stimulan bagi terjadinya *fraud* seperti sistem pengendalian intern yang lemah, sistem pengendalian yang tidak memadai dan tidak efektif serta adanya inkonsistensi dalam menjalankan prosedur yang telah dibuat, jelas akan sangat besar peranannya dalam menciptakan peluang terjadinya *fraud*. Berbagai referensi memberikan terminologi mengenai *fraud*, namun pada intinya diperoleh konsep dasar mengenai arti *fraud* yang diartikan sebagai pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dengan menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung dan memberikan keuntungan bagi pelakunya. *Fraud* yang terjadi dapat mempengaruhi secara negatif dalam banyak hal pada perusahaan, baik dalam keuangan, reputasi, psikologi dan implikasi sosial. Para pelakunya dapat dari level terendah sampai dengan level tertinggi. Mengenai pentingnya pencegahan tindakan *fraud* baik itu terjadi maupun yang akan terjadi mengharuskan pihak manajemen untuk mengerti mengenai *fraud* itu sendiri serta tindakan yang tegas dalam mencegah *fraud* itu terjadi.

Adanya peluang dan kemampuan untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan akibat kurangnya pengawasan atau *enforcement* di bank atau *control* bank yang tidak berhasil mencegah terjadinya praktik kecurangan, ditambah kurangnya pengawasan manajemen yang konsisten dalam menjalankan segala prosedur yang telah dibuat. Selain itu juga adanya tekanan (*preassure*) berkaitan dengan pikiran atau pandangan dan kepentingan pegawai yang takut kehilangan pekerjaan atau jabatan sehingga orang yang jujur juga memiliki motif untuk melakukan kecurangan. (W. Steve Albrecht & Chad O. Albrecht, *Fraud Examination 2003*) Menurut penelitian 95% kasus kecurangan terjadi akibat tekanan *financial*.

Berdasarkan laporan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Aprilia (2017), pada tahun 2002 kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya *fraud* di Amerika Serikat adalah sekitar 6% dari pendapatan atau sebesar \$600 milyar dan secara persentase tingkat kerugian ini tidak banyak berubah dari tahun 1996. Dari kasus-kasus *fraud* tersebut, jenis *fraud* yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan aset (*asset misappropriations*) sebesar 85%, kemudian disusul dengan korupsi (13%) dan jumlah paling sedikit sebesar 5% adalah kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statements*). Walaupun demikian *fraudulent statement* membawa kerugian paling besar yaitu dengan rata-rata kerugian sekitar \$ 4,25 juta.

Salah satu contoh kasus *fraud* diperbankan adalah kasus CitiBank pada bulan Maret 2011 dengan kasus kecurangan yang dilakukan oleh salah satu manajernya untuk menyembunyikan asal usul penggelapan dana nasabah dengan

memecah transaksi menjadi beberapa transaksi agar tidak diketahui sumber dananya dengan dibantu oleh teller dalam memproses transaksi tersebut, akibat kasus ini dana nasabah yang dirugikan mencapai 40 milyar rupiah (<http://surabayapagi.com>, 2/10/2014). Hal ini merupakan salah satu kasus *fraud* yang dilakukan oleh manajer bank serta dibantu oleh teller dan head teller, dalam hal ini slip blanko dan surat kuasa yang kosong untuk ditandatangani oleh nasabah prioritas dan teller membantu dalam proses pengisian slip tersebut, hal ini tentu saja merugikan bank sehingga citra bank tersebut merosot dimata masyarakat dan kerugian *financial* lainnya yang timbul dari kasus pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat dan petugas bank ini.

Kasus *fraud* lainnya yang dilakukan oleh salah satu karyawan bank adalah kasus pada Bank Central Asia (BCA) pada bulan Desember 2011 dengan kasus kecurangan dalam hal meloloskan permohonan kredit fiktif yang dilakukan oleh seorang karyawan BCA sebagai Account Officer Senior dengan tugasnya untuk menganalisis kredit yang diajukan nasabah dengan bekerjasama pada seorang broker properti perumahan, kasus tersebut merupakan kasus *mark up* pencairan pinjaman kredit dengan dokumen-dokumen fiktif dan debitur fiktif sebagai upaya untuk mencairkan dana dengan menjaminkan asset palsu kepada pihak bank sebesar 25 milyar rupiah melalui perantara karyawan bank yang tidak melakukan prosedur pemeriksaan sesuai standar aturan yang berlaku untuk meyetujui pengajuan kredit fiktif tersebut (<http://beritasatu.com>, 3/4/2014). Kasus kecurangan ini tentu saja merugikan banyak pihak baik itu kerugian material

ataupun kerugian non material didalam perusahaan serta reputasi dan kredibilitas BCA sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia.

Fenomena di atas merupakan kasus *fraud* yang terjadi karena kurang efektifnya beberapa sektor pendukung dalam pengawasan. Internal audit mempunyai wewenang untuk masuk ke seluruh area, fungsi serta kegiatan atau divisi suatu perusahaan dan secara independen mengevaluasi seluruh permasalahan yang ada. Auditor bukan hanya sebagai pengawas semata yang mencari kesalahan atas ketidaksesuain dan kekeliruan yang dilakukan oleh karyawan namun sebagai penasehat (*advisor*) yang memberikan rekomendasi serta saran perbaikan terhadap seluruh permasalahan operasional hasil auditnya. Dengan kedudukan, wewenang dan fungsi yang dimilikinya, internal auditor diharapkan menjadi orang kepercayaan manajemen dan direksi.

Sejarah pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari adanya keinginan untuk mengembangkan perbankan nasional sekaligus untuk menanggulangi kejahatan perbankan yang menyertainya. Pengawasan bank melalui audit terhadap bank pemerintah dilakukan berlapis-lapis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Akuntan Publik termasuk oleh Bank Indonesia sendiri. Namun, mengapa dengan berbagai upaya tersebut, pembobolan yang mencolok mata tetap terjadi. Hal ini merefleksikan pengawasan bank yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk menghindari maupun untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi, maka perlu manajemen yang berperan sebagai pengelola dan pengendali

terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Ada beberapa fungsi manajemen dalam melakukan kegiatannya dapat dibedakan, diantaranya adalah fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengendalian. Masing - masing fungsi tersebut mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya, sehingga manajemen harus berusaha untuk mengelola sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara efektif dan efisien. Disamping itu, juga waspada terhadap semua indikasi dan berani dengan segera mengambil reaksi terhadap setiap resiko yang timbul. Fungsi pengendalian merupakan fungsi yang mengatur dan mengukur apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan bagaimana penyimpangan yang terjadi, sehingga memungkinkannya dilakukan suatu tindakan. Dengan adanya pengendalian diharapkan akan tercapai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Pada perusahaan yang besar yang jumlah karyawannya sangat banyak dan kegiatan operasi perusahaannya sangat kompleks, manajemen akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi pengendalian ini. Manajemen tidak dapat lagi secara langsung mengawasi jalannya operasi perusahaan.

Untuk menjaga itu semua khususnya di sektor perbankan, maka diperlukannya suatu pengendalian internal dimana Bank Indonesia sebagai pusat perbankan di Indonesia telah menetapkan aturan - aturan dalam **Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1/6/PBI/1999 tgl 20 September 1999, pasal 9 huruf (b)** yang berbunyi, "*Bank umum wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai pelaksana fungsi audit internal*". Maka dari itu audit internal yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sangat diperlukan dalam pemedeteksian terjadinya *fraud* dalam kegiatan operasional perbankan.

Sawyer,dkk., (2003:358) berpendapat jika auditor internal ingin berhasil dalam mendeteksi *fraud*, mereka harus mengembangkan kewaspadaan yang tinggi mengenai bagaimana *fraud* dapat terjadi dan mengapa. Dengan mengetahui apa itu *fraud* beserta jenis-jenisnya maka dapat melakukan antisipasi dini atau mencegah kemungkinan terjadinya *fraud* sekaligus bisa memberikan respon yang tepat misalkan dengan memberikan teguran atau melaporkannya kepada pihak manajemen.

Namun, pendeteksian terhadap *fraud* saja tidaklah memadai, auditor internal harus memahami pula bagaimana cara melakukan pencegahan secara terhadap terjadinya *fraud* yang mungkin saja timbul. Pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Pencegahan *fraud* bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* (Fitrawansyah, 2014:16) dalam (Festi, dkk., 2014).

Dari uraian yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana audit internal mempunyai hubungan dan saling mempengaruhi terhadap pendeteksian dan pencegahan *fraud* serta menuangkannya kedalam suatu judul penelitian yaitu **“PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PT BANK MUAMALAT INDONEISA, TBK (Studi pada Kantor Wilayah Pusat)”**

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peranan auditor internal berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ?
2. Apakah peranan auditor internal berpengaruh dalam mencegah *fraud* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ?

1.2.2 Batasan Penelitian

Penulis membatasi beberapa hal untuk memfokuskan penelitian ini. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan juga untuk menciptakan keefektifan waktu dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Pengukuran pengaruh keefektifan yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada ketentuan dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam masalah prosedur pencegahan *fraud*, dengan tetap mengacu pada peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
2. Penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada para pegawai Audit Internal Kantor Wilayah Pusat PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah agar dapat mengumpulkan data dan informasi yang dijadikan referensi bagi penulis berkaitan dengan peran audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, kemudian diolah dan dianalisis serta diinterpretasikan sehingga mendapatkan gambaran umum mengenai pengaruh terhadap objek yang diteliti.

Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah peranan audit internal berpengaruh dalam pendeteksian *fraud* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Untuk mengetahui apakah peranan audit internal berpengaruh dalam pencegahan *fraud* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan, penulis berharap agar hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Untuk meningkatkan teori pemahaman mengenai peran audit internal
- b. Untuk mengetahui teori pemahaman mengenai Fraud (Kecurangan)
- c. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pendeteksian dan pencegahan *fraud* pada kegiatan perbankan.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi penulis

Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai audit internal dan cara pengendalian yang ditetapkan oleh suatu bank terhadap pencegahan *fraud* pada kegiatan operasional bank.

b. Bagi pihak bank

Menjadi bahan masukan bagi bank untuk melakukan peningkatan pada kinerja audit internal, sehingga kualitas audit internal semakin baik terutama dalam rangka pencegahan terjadinya *fraud* pada pelaksanaan kegiatan operasional bank. Jika pelaksanaannya efektif maka pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.

c. Bagi peneliti yang akan datang

Sebagai masukan dan tambahan referensi bagi pihak yang tertarik pada bidang perbankan.

1.4 Sistematika penulisan

Skripsi ini disusun lima bab dengan masing-masing sub babnya. Bab-bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjadi pemandu bagi uraian dan pembahasan mengenai hal yang mendorong penulis membahas masalah yang dijadikan judul skripsi. Bab ini meliputi uraian mengenai latar belakang masalah,

identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TUNJUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan hal-hal teoritis yang berkaitan dengan konsep umum audit, definisi, jenis dan tujuan audit, konsep umum audit internal, pengertian, tujuan dan fungsi audit internal, standar profesional audit internal, identifikasi audit internal, satuan kerja audit internal, pengertian fraud, unsur-unsur fraud, jenis bentuk fraud, pencegahan fraud, metode pencegahan fraud dan pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud*.

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan dibahas mengenai definisi operasional variable, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta penyajian data yang diperoleh dan dilengkapi dengan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Mencakup semua rangkuman yang megarah pada suatu kesimpulan mengenai judul yang diambil dan sebagai tambahan akan dimasukkan pula saran-saran tentang permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Umum Audit

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba disamping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua tahap kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisa dan diteliti secara seksama terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggung jawab.

Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada Perusahaan, maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajemen semakin bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama manajemen, fungsi pengawasan dan pengendalian adalah aktivitas audit.

2.1.1 Definisi Audit

Ada banyak pendapat mengenai audit yang dikemukakan oleh para ahli, menurut **Arens, Alvin A., Mark S. Beasley., Elder, Randal J (2011:4) :**

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Menurut **Mulyadi (2002:9)** mendefinisikan pengertian audit sebagai berikut:

“Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian serta pernyataan-pernyataan tersebut

dengan kriteria yang telah ditetapkan , serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan *independent* yang dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

2.1.2 Jenis Audit

Beberapa jenis audit dilakukan untuk memastikan bahwa proses operasi didalam Perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta pengelolaan terhadap sumber daya dalam proses tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut **Arens, Alvin A., Mark S. Beasley., Elder, Randal J (2011:16)** mengemukakan tiga jenis audit, yaitu :

a. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya.

b. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak audit telah mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

c. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

Menurut **IBK Bayangkara (2011:2-3)** terdapat beberapa jenis-jenis audit, yaitu:

1. Pada audit kepatuhan (*Compliance Audit*), auditor berusaha mendapatkan dan mengevaluasi informasi untuk menentukan apakah pengelolaan keuangan, operasi, atau aktivitas yang lain dari suatu entitas telah sesuai dengan kriteria, kebijakan, atau regulasi yang mendasarinya.
2. Dalam Audit Internal (*Audit Internaling*), auditor melakukan penilaian secara independen terhadap berbagai aktivitas dalam memberikan jasanya kepada

Perusahaan. Secara lengkap *Institute of Audit Internalor (IIA)* mendefinisikan *Audit Internaling* sebagai:

“an independent appraisal activity established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization. The object of Audit Internaling is to assist members in the organization in the effective discharge of their duties”.

Dari definisi di atas sudah jelas bahwa kegiatan penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan sebagai pelayanan kepada organisasi. Tujuan dari Audit Internal adalah untuk membantu anggota dalam organisasi dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif.

3. Audit operasional (*operation auditing*) memfokuskan penilaiannya pada efisiensi dan efektivitas operasi suatu entitas. Lebih lanjut **AICPA** mendefinisikan *operational auditing* sebagai:

“a systematic review of an organization activities...in relation to specified objective. The purpose of the engagement may be: (a) to assess performance, (b) to identify opportunities for improvement, and (c) to develop recommendation for improvement or further action”.

Dari definisi di atas sudah jelas bahwa review sistematis dari suatu kegiatan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan tertentu. Tujuan dari keterlibatan mungkin: (a) untuk menilai kinerja, (b) untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, dan (c) untuk mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

4. Audit keuangan (*financial audit*) merupakan audit yang paling tua dan paling populer. Audit ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dan penilaian terhadap sistem pelaporan akuntansi dan keuangan. Dilihat dari ketersediaan

prosedur dan teknik audit, audit ini memiliki prosedur dan teknik yang paling lengkap dan baku. Di samping pelaksanaan auditnya telah dipimpin dengan norma audit yang standar, karena dikeluarkan oleh asosiasi profesi dibidangnya, juga objek yang diaudit telah dipimpin dengan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*general accepted accounting principle-GAAP*). Audit operasional menekankan penilaian terhadap prosedur operasi dalam meningkatkan efisiensi. Audit ini merupakan perluasan dari Audit Internal, sehingga dalam audit ini penilaian terhadap pencapaian tujuan pengendalian internal juga menjadi tujuan audit yang sangat penting.

Dari berbagai jenis audit yang dilakukan kecuali audit keuangan, keseluruhan audit memiliki tujuan yang (hampir) sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoperasikan Perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi proses dalam mencapai tujuan Perusahaan secara taat asas.

2.1.3 Tujuan Audit

Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada Perusahaan tersebut. Berkaitan dengan tujuan ini titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang, di samping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian. **IBK. Bayangkara (2011:4)** menyatakan bahwa tujuan audit diantaranya, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan, bertujuan menentukan apakah laporan keuangan *auditee* telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Audit Kepatuhan, bertujuan menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur.
3. Audit Internal, bertujuan:
 - a. Menilai keandalan laporan keuangan.
 - b. Menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana dan prosedur.
 - c. Menilai pengendalian internal organisasi.
 - d. Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
 - e. Program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi.
4. Audit Operasional (Manajemen), bertujuan menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program/aktivitas yang dilakukan. Periode audit juga bervariasi, bisa untuk jangka waktu satu minggu, beberapa bulan, satu tahun, bahkan untuk beberapa tahun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2.1.4 Konsep Umum Audit Internal

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan akan tercapai, maka pengendalian secara terus-menerus memerlukan pengawasan dari manajemen. Oleh karena itu manajemen memerlukan bagian khusus untuk

melakukan penilaian atas pengendalian internal, bagian ini disebut bagian audit intern yang mempunyai tugas pokok membantu direksi dalam menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian intern organisasi dan kualitas suatu pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan. Mengingat besarnya fungsi audit intern, maka selayaknya audit intern dilaksanakan oleh mereka yang mempunyai integritas yang tinggi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

2.1.5 Pengertian Audit Internal

Pengertian audit internal dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikemukakan oleh **Hiro Tugiman (2006:11)**: *“Audit intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”*.

Menurut **Mulyadi (2002:211)** yang menyatakan bahwa:

“Audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas dan terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.”

Menurut *Commitee of Sponsoring Organization of The Tradeway Commision (COSO)*, yang didukung oleh **AICPA, IIA, AAA, IMA** dan para eksekutif perusahaan yang dikutip oleh **Akmal (2007:24)**, menyatakan bahwa:

“Audit Internal sebagai pengendalian intern atas proses yang dilakukan oleh manusia (dewan direksi, manajemen dan pegawai) yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang masuk akal atau memadai untuk mencapai tujuan-tujuan: 1) Keandalan informasi, 2) Ketaatan dan peraturan yang berlaku, 3) Efisiensi dan efektifitas operasi.”

Dari definisi diatas dapat terlihat bahwa audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dan terdapat dalam organisasi untuk memeriksa, menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dan untuk membantu para anggota organisasi dalam menjalankan kewajiban mereka secara efektif.

2.1.6 Tujuan Audit Internal

Tujuan audit internal menurut **Hiro Tugiman (2006:11)** yang menyatakan bahwa:

“Audit intern bertujuan menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan operasi, atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.”

Definisi lain tentang audit intern menurut **Ikatan Akuntansi Indonesia Standar Akuntansi Keuangan (2012:382)** yang menyatakan bahwa:

“Tujuan utama fungsi audit adalah mereview, menetapkan, dan memantau kebijakan dan prosedur internal auditor. Prosedur yang dilaksanakan oleh internal auditor adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari audit intern adalah untuk menilai pekerjaan, operasi, atau program apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.7 Fungsi Audit Internal

Fungsi audit intern menurut **Hiro Tugiman (2006:11)** menyatakan bahwa:

"Suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen. Tujuannya adalah membantu semua tingkatan manajemen, agar tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif."

Sedangkan menurut **Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15)** menyatakan bahwa:

"Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan organisasi."

Dapat disimpulkan bahwa fungsi audit intern adalah untuk memantau kinerja pengendalian suatu organisasi, menelaah dan mempelajari, serta menilai kegiatan perusahaan juga membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

2.1.8 Standar Profesional Audit Internal

Seorang auditor intern harus berada diluar lini perusahaan dalam kinerjanya, tetapi tidak lepas dari kesatuan tersebut sejauh masih terjalin hubungan karyawan dan atasan, auditor intern berkewajiban memberikan keterangan – keterangan yang berharga kepada manajemen untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan operasi perusahaan.

Unit audit internal merupakan bagian yang potensial dan esensial untuk melakukan monitoring. Agar fungsi ini efektif, maka dirasakan penting bahwa staf audit internal independen baik untuk operasional maupun akuntansinya, serta dapat melaporkan hasil auditnya langsung pada pihak yang memiliki otoritas yang

lebih tinggi dalam organisasi, baik itu pada top manajemen ataupun pada komite audit. Manajemen atau pengelolaan yang berhasil dari satuan audit intern bukan diukur dari volume atau jumlah temuan yang berhasil dikumpulkan, tetapi lebih ke arah manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak manajemen dengan hadirnya satuan audit intern ini.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari unit audit internal, auditor internal berpedoman pada standar, pedoman dan prosedur. Pedoman ini menyajikan stabilitas, kontinuitas, dan standar pelaksanaan yang dapat diterima, serta merupakan alat untuk mengkoordinasi berbagai usaha dan tindakan para staf dan orang-orang yang ada di dalam organisasi satuan audit intern. Pedoman dan prosedur pengawasan dibutuhkan staf audit, untuk :

- a. Mencegah masing-masing individu untuk bertindak inkonsisten dan menyimpang.
- b. Menetapkan standar untuk meningkatkan kinerja.
- c. Menyajikan kepastian bahwa produk akhir departemen audit internal memenuhi standar yang ditetapkan top manajemen.

Standar profesi audit internal merupakan instrument untuk mengendalikan kualitas kinerja audit internal. Standar ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan aktivitas audit internal agar dalam memenuhi tanggung jawabnya, audit internal dapat berperan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) menurut **Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal SPAI (2004:5)** mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor.
- 2) Menjadi saran bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan audit internal.
- 3) Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi.
- 4) Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi.
- 5) Menjadi acuan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal.
- 6) Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya.

Audit internal yang baik yaitu apabila telah mengikuti dan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Profesional Internal Audit menurut **Hiro Tugiman (2006:16)** yang meliputi :

- “ 1. *Independensi*
Audit intern harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya
2. *Kemampuan Profesional*
Audit intern harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional
3. *Lingkup Pekerjaan*
Lingkup pekerjaan auditor intern harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan

4. *Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan*

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian, serta pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil, dan menindaklanjuti (follow up)

5. *Manajemen Bagian Audit Internal*

Pimpinan audit intern harus mengelola bagian audit intern secara tepat.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal harus sesuai dengan standar praktik dari audit intern yaitu:

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen Bagian Audit Internal

2.1.9 Independensi Audit Internal

Menurut **Arens, Elder dan Belsey (2008:83)** menyatakan bahwa:

“ Independence in fact exist when the auditor is actually able to maintain an unbiased attitude throughout the audit, whereas independence in apperance is the result of other interpretations of this independence ”.

Batasan independensi dari auditor intern menurut **Hiro Tugiman (2006:101)** menyatakan bahwa:

1. *Status organisasi bagian audit internal haruslah memadai serta memberikan keleluasaan untuk memenuhi tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Pimpinan audit internal harus bertanggung jawab kedalam pimpinan didalam organisasi yang memiliki kewenangan cukup untuk meningkatkan independensi dan untuk memastikan luas pemeriksaan yang dicakup, pertimbangan yang cukup terhadap laporan pemeriksaan, dan tindakan yang sesuai berdasarkan rekomendasi pemeriksaan.*
2. *Objektivitas adalah sikap mental yang mandiri atau independen yang harus dikembangkan oleh auditor intern dalam melaksanakan*

pemeriksaan. Audit intern tidak boleh menempatkan penilaiannya yang dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan berdasarkan penilaian orang lain.”

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor intern haruslah mandiri dan tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diperiksa. Auditor intern dianggap mandiri atau independen apabila mereka dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif.

2.1.10 Kemampuan Profesional Audit Internal

Menurut **Hiro Tugiman (2006:27)** tentang kemampuan profesional audit menyatakan bahwa :

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.”

Menurut **Hiro Tugiman (2006:27)** menyatakan tentang cakupan kemampuan profesional audit intern yaitu :

“Unit Audit Internal :

- 1. Personalia: bagian audit intern haruslah memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para auditor intern telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan.*
- 2. Pengawasan: bagian audit intern haruslah memberikan kepastian bahwa pelaksanaan audit intern akan diawasi sebagaimana mestinya.*

Audit Internal :

- 1. Kesesuaian Dengan Standar Profesi : Para auditor intern harus mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan.*
- 2. Pengetahuan dan Kecakapan : Para auditor intern harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.*

3. *Hubungan antar Manusia dan Komunikasi : Para auditor intern harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.*
4. *Pendidikan Berkelanjutan: Para auditor intern harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.*
5. *Ketelitian Profesional : Para auditor intern harus melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam melaksanakan pemeriksaan.”*

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan profesional audit intern dilihat dari:

1. Personalia
2. Pengawasan
3. Kesesuaian dengan Standar Profesi
4. Pengetahuan dan Kecakapan
5. Hubungan antar Manusia dan Komunikasi
6. Pendidikan Berkelanjutan
7. Ketelitian Profesional

2.1.11 Lingkup Pekerjaan Audit Internal

Menurut **Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:20)**

menyatakan bahwa:

“Fungsi audit intern melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan resiko, pengendalian dan governance dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh.”

Menurut **Sawyer, Dittenhofer dan Scheiner (2005:32)** tentang lingkup

pekerjaan audit menyatakan sebagai berikut:

“Lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.”

Sedangkan menurut **Hiro Tugiman (2006:41)**, lingkup pekerjaan auditor intern adalah sebagai berikut :

- “1. *Lingkup pekerjaan audit intern, sebagaimana ditetapkan dalam standar ini, meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Walau demikian, dimungkinkan pula diberi pedoman umum oleh manajemen dan dewan tentang lingkungan pekerjaan dan kegiatan yang akan diperiksa.*
2. *Tujuan peninjauan terhadap kecukupan suatu sistem pengendalian intern adalah menentukan apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan dapat dicapai secara ekonomis dan efisien.*
3. *Tujuan peninjauan terhadap keefektifan sistem pengendalian intern adalah memastikan apakah sistem tersebut berfungsi sebagaimana yang diharapkan.*
4. *Tujuan peninjauan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan adalah memastikan apakah tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai.*
5. *Tujuan utama pengendalian intern adalah meyakinkan:*
 - 1) *Keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi ;*
 - 2) *Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang – undangan ;*
 - 3) *Perlindungan terhadap harta organisasi ;*
 - 4) *Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien ;*
 - 5) *Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.*
- 6) *Pengendalian adalah berbagai tindakan yang dilakukan manajemen untuk mempertinggi kemungkinan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran.*
- 7) *Manajemen bertugas merencanakan, menyusun, dan mengatur sedemikian rupa untuk memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.*
- 8) *Auditor intern harus menguji dan mengevaluasi berbagai proses perencanaan, penyusunan, dan pengaturan untuk menentukan apakah terdapat kepastian bahwa berbagai tujuan dan sasaran dapat dicapai.”*

Berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa lingkup pekerjaan auditor intern meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan pengendalian internal perusahaan untuk memastikan:

1. Keandalan informasi,
2. Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur dan ketentuan perundang – undangan,
3. Perlindungan terhadap harta,
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta
5. Pencapaian tujuan.

Keandalan informasi audit intern adalah sebagai berikut :

(Hiro Tugiman 2006:47)

“Auditor intern harus meninjau keandalan (realibilitas dan integritas) berbagai informasi financial dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan.”

Sistem informasi akan menyediakan data yang dipergunakan untuk pembuatan keputusan, pengendalian, dan penyesuaian dengan berbagai persyaratan eksternal. Karena itu, audit intern haruslah menguji sistem informasi tersebut, dan apabila perlu menentukan apakah :

1. Berbagai catatan, laporan finansial, dan operasional mengandung informasi yang akurat, dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap dan berguna.
2. Telah dilakukan pengawasan yang cukup dan efektif atas penyimpanan catatan dan pelaporan.

Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan audit intern adalah:

(Hiro Tugiman 2006: 48)

”Auditor intern harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki, akibat yang penting terhadap berbagai pekerjaan atau operasi dan laporan serta harus menentukan terhadap berbagai pekerjaan atau operasi dan laporan, serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi atau melaksanakan hal-hal tersebut.”

Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan sistem yang dibuat dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai persyaratan seperti kebijaksanaan, rencana, prosedur, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan. Audit intern bertanggung jawab menentukan apakah sistem tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Perlindungan terhadap harta yang dilakukan oleh auditor intern adalah:

(Hiro Tugiman, 2006:48)

”Auditor intern harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan dari suatu harta atau aktiva.”

Yang harus dilakukan oleh auditor intern adalah:

1. Auditor intern harus meninjau berbagai alat atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal atau tidak pantas.
2. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu harta, pemeriksa harus mempergunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

Audit intern harus mempergunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien yang dimaksud dengan penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien adalah:

(Hiro Tugiman 2006:49)

"Auditor intern harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada."

Audit intern yang baik harus menilai sumber daya secara ekonomis dan efisien, seperti:

(Hiro Tugiman 2006:49)

1. *"Manajemen bertanggung jawab menetapkan standar operasional yang dipergunakan untuk mengukur keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan."*
2. *"Pemeriksaan yang berhubungan dengan keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya haruslah mengidentifikasi berbagai keadaan."*

Pencapaian yang akan dituju dalam audit intern adalah:

(Hiro Tugiman 2006:49)

"Auditor intern haruslah menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana."

Maksud dari pernyataan diatas adalah:

1. Manajemen bertanggung jawab menetapkan berbagai tujuan dan sasaran dari program, pengembangan, dan penerapan prosedur pengawasan serta pencapaian hasil pekerjaan yang diinginkan. Auditor intern harus menilai apakah tujuan dan sasaran tersebut telah sesuai dengan tujuan organisasi, dan apakah hal-hal tersebut dapat dicapai.
2. Auditor intern dapat memberikan bantuan kepada manajer yang bertanggung jawab untuk menentukan, tujuan, sasaran, dan sistem dengan menentukan apakah berbagai asumsi yang mendasari suatu hal telah sesuai; apakah telah

menggunakan berbagai informasi yang akurat, terbaru dan relevan; apakah telah dilakukan pengawasan yang sesuai bagi suatu kegiatan atau program.

2.1.12 Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut **Hiro Tugiman (2006:18)** adalah:

- ”1. *Perencanaan pemeriksaan: Auditor intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan.*
2. *Pengujian dan pengevaluasian informasi: Auditor intern harus mengumpulkan, menganalisis, mengintepretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.*
3. *Penyampaian hasil pemeriksaan: Auditor intern harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya.*
4. *Tindak lanjut hasil pemeriksaan: Auditor intern harus terus meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tetap.”*

Tahap pertama yang dilakukan oleh auditor intern dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan harus mengacu pada perencanaan audit intern yang telah ditetapkan. **Hiro Tugiman (2006:53)** menyatakan perencanaan audit intern harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal berikut ini:

- ”1. *Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan*
2. *Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan yang akan diperiksa*
3. *Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan*
4. *Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu*
5. *Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa*
6. *Penulisan program pemeriksaan*
7. *Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan. Pimpinan audit internal bertanggung*

jawab menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil pemeriksaan akan disampaikan
8. *Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.”*

Tahap kedua dalam melaksanakan kegiatan audit intern yaitu pengujian dan pengevaluasian informasi pemeriksaan. Pengujian dan pengevaluasian informasi audit intern menurut **Hiro Tugiman (2006:59)** adalah: *”Auditor intern haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.”*

Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

1. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.
2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
3. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian.
4. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.
5. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh pemeriksa dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian audit internal.

Tahap ketiga dalam pelaksanaan kegiatan audit intern yaitu penyampaian hasil pemeriksaan, penyampaian hasil pemeriksaan seperti yang dikemukakan

oleh **Hiro Tugiman (2006:68)** adalah: *"Pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya."*

Yang harus dilakukan oleh auditor intern dalam menyampaikan hasil pemeriksaannya menurut **Hiro Tugiman (2006:68)** adalah:

1. *Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara formal atau informal.*
2. *Auditor intern harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir.*
3. *Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu.*
4. *Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa.*
5. *Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.*
6. *Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.*
7. *Pimpinan audit intern atau staf yang ditunjuk harus mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan."*

Tahap keempat yaitu tahap terakhir dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut **Hiro Tugiman (2006:75)** sebagai berikut:

"Auditor intern harus terus - menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat."

Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat menurut **Hiro Tugiman (2006:76)** adalah sebagai berikut :

- ”1. Pentingnya temuan yang dilaporkan
2. Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan
3. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal
4. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif, dan
5. Jangka waktu yang dibutuhkan.”

2.1.13 Manajemen Bagian Audit Internal

Pengertian manajemen bagian audit intern menurut **Hiro Tugiman (2006:19)** adalah:

- ”1. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab: Pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal.
2. Perencanaan: Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.
3. Kebijaksanaan dan prosedur: Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa.
4. Manajemen personel: Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
5. Auditor eksternal: Pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usaha-usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal.
6. Pengendalian mutu: Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal.”

2.1.14 Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

1. Kebijakan Umum SKAI

Audit intern bank merupakan fungsi dalam organisasi bank yang memiliki peranan penting dalam rangka untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat serta untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank. Agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif maka perlu adanya kesamaan pemahaman mengenai misi, independensi,

wewenang, kedudukan, tanggung jawab Satuan kerja Audit Intern (SKAI) sebagai pelaksana audit intern bank juga ruang lingkup dari pekerjaan audit intern.

Dengan pemikiran tersebut maka Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan di Indonesia mengeluarkan **Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1 / 6 / PBI / 1999 tentang “ Penugasan direktur kepatuhan (*compliance director*) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum”** yang kemudian dalam **pasal 9 huruf (b) berbunyi**, “*Bank umum wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai pelaksana fungsi audit internal.*” Kewajiban kepada setiap bank umum dalam menerapkan SPFAIB ini merupakan ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank umum di Indonesia. Dan jika dipandang perlu dapat diperluas dan diperdalam sesuai dengan kebutuhan bank masing-masing untuk lebih memperlancar pelaksanaannya.

2. SKAI Sebagai Pelaksana Fungsi Audit Internal Bank

SKAI harus memiliki sikap mental dan etika profesi yang tinggi sehingga kualitas hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk membantu terwujudnya perkembangan bank yang wajar dan sehat.

Disamping itu SKAI berfungsi untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini auditor intern mewakili pandangan dan profesinya

dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on site* dan pemantauan secara *off site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.

2.2 Kecurangan (*Fraud*)

Pada kenyataannya *fraud* hampir terdapat di setiap lini pada organisasi, mulai dari jajaran manajemen sampai kepada jajaran pelaksana bahkan bisa sampai ke pesuruh (*office boy*). *Fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun. (Valery G. Kumaat, 2011:135) Tindak *fraud* adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela.

Pada umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (*Error*) dan ketidakberesan (*irregularities*). *Error* merupakan kesalahan yang timbul sebagai akibat tindakan yang tidak sengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan dan lain-lain. Sedangkan *irregularities* merupakan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang menimbulkan kerugian material atau kerugian non material yang merugikan perusahaan, misalnya kecurangan (*fraud*).

2.2.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Fraud merupakan salah satu bentuk *irregularities*. Secara singkat *fraud* dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyikan fakta material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu. Untuk lebih jelasnya, pengertian kecurangan menurut **Amin Widjaja Tunggal (2012:169)** adalah sebagai berikut:

“Fraud is an advantage gained by unfair or wrong ful means, an infraction of the rules of fair trade; a false representation of fact made knowingly; without belief in its truth, recklessly, not caring whether it is true or false”.

Definisi lain mengenai *fraud* menurut **Peraturan Bank Indonesia dalam SE Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011** adalah sebagai berikut:

“Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak pelakunya sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan baik materil maupun imateril.

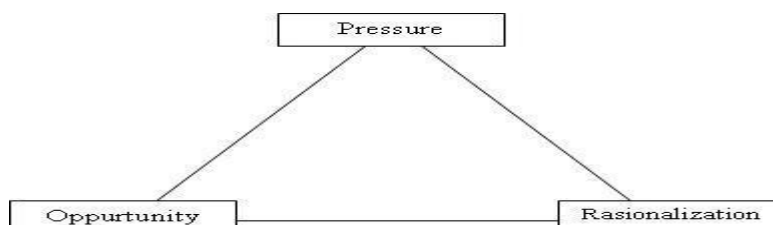
2.2.2 Faktor – Faktor Pendorong *Fraud*

Terdapat tiga elemen kunci yang umum untuk menggambarkan semua *fraud* yaitu: (1) tekanan yang dirasakan, (2) kesempatan yang dirasakan, dan (3) beberapa cara untuk merasionalisasi *fraud* agar bisa diterima (Albrecht, dkk.,

2012:34). Ketiga elemen tersebut disebut sebagai *the fraud triangle*, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1

Fraud Triangle Theory



Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor pendorong *fraud* boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan “kesempatan/peluang” untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan. **Valery G Kumaat (2011:139)** menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah sebagai berikut:

- ”1. *Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan ‘celah’ risiko.*
2. *Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (common business sense) yang berlaku.*
3. *Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi business process.*
4. *Evaluasi yang tidak berjalan terhadap business process yang berlaku.”*

Menurut pendapat **Karni (2000:38)** menyatakan bahwa faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah sebagai berikut:

- “1. *Lemahnya pengendalian internal*
 - a. *Manajemen tidak menekankan perlunya peranan pengendalian internal*
 - b. *Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan*
 - c. *Manajemen tidak mengambil sikap dalam terjadi conflict interest*

- d. Auditor internal tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif, terutama menyangkut pengeluaran besar
- 2. Tekanan keuangan terhadap seseorang
 - a. Banyaknya hutang
 - b. Pendapatan rendah
 - c. Gaya hidup mewah
- 3. Tekanan non finansial
 - a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan
 - b. Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan dengan bawahannya
 - c. Penurunan penjualan
- 4. Indikasi lain
 - a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai negeri
 - b. Meremehkan integritas pribadi
 - c. Kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal.”

Menurut **Simanjuntak (2008:4)** terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu:

1. *Greed* (keserakahan).
2. *Opportunity* (kesempatan).
3. *Need* (kebutuhan).
4. *Exposure* (pengungkapan).

Greed dan *need* termasuk dalam faktor individu yang merupakan hal bersifat sangat personal dan diluar kendali Perusahaan sehingga sulit sekali dapat dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan kebutuhan ditambah dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah seseorang akan cenderung melanggar ketentuan dan aturan.

Opportunity dan *Exposure* disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih di dalam kendali Perusahaan sebagai korban perbuatan *fraud*. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat *fraud* kerana pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi

ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara *exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi terhadap pelaku *fraud* tergolong ringan sehingga para karyawan Perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan *fraud*.

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena Perusahaan tidak menindak tegas pelaku *fraud* sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku *fraud*.

2.2.3 Unsur – Unsur *Fraud*

Suatu *fraud* terdiri dari unsur – unsur penting yang digunakan untuk menguji tanda – tanda *fraud* atau tidak. Dalam artikelnya ***Recognizing The Elemento of Fraud, Simmons (2003)*** menyatakan bahwa:

“ Fraud occurs when all of the following element exist:

1. *An individual or an organization intentionally makes an untrue representation about an important fact of event*
2. *The untrue representation is believed by victim (the person or organization to whom the representation has been mad)*
3. *The victim relies upon and acts upon the untrue representation*
4. *The victim suffers loss of money and or property as a result of relying upon and acting upon the untrue representation.”*

Maka dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *fraud* terjadi apabila terdapat unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan dari individu atau organisasi untuk membuat perjanjian yang keliru mengenai peristiwa atau fakta yang penting.
2. Adanya kepercayaan dari korban *fraud* terhadap perjanjian yang keliru.

3. Adanya kepercayaan dari korban *fraud* untuk melaksanakan penyajian yang keliru tersebut.
4. Korban *fraud* menderita kehilangan hak milik atau uang karena telah mempercayai dan bertindak sesuai dengan penyajian yang keliru.

2.2.4 Jenis dan Bentuk *Fraud*

Dalam artikel yang berjudul **komputer vs *Fraud audit*** oleh **Wahyuni** disebutkan bahwa klasifikasi terjadinya *fraud* tergantung pada kreativitas pelaku *fraud*. Jenis *fraud* menurut **Schulze dan Black** yang dikutip oleh **Wahyuni (2000:17-18)** adalah sebagai berikut: “(1) *Kecurangan Manajemen (Management Fraud)* dan (2) *Kecurangan Karyawan (Employee Fraud)*.”

Dari pernyataan diatas, jelas bahwa *fraud* dapat dilakukan oleh manajemen dan karyawan perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan kecurangan manajemen (*management fraud*) dan kecurangan karyawan (*employee fraud*).

1. Kecurangan manajemen (*Management Fraud*)

Manajemen mungkin akan terlibat dengan setiap macam *fraud*. *Management fraud* adalah suatu tindakan sengaja dalam melakukan transaksi yang direkayasa. Misalnya menyembunyikan dan menyamarkan proses transaksi nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur operasional maupun dalam memanipulasi laporan keuangan dan dokumen – dokumen penting. Menurut **Albrechth** dalam buku ***fraud examination (2003:9)*** menyatakan bahwa: “*In its most common form, management fraud involves top management’s deceptive manipulation of financial statement.*”. Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa

kecurangan manajemen (*management fraud*) yang biasa dilakukan adalah memanipulasi laporan keuangan.

2. Kecurangan karyawan (*Employee Fraud*)

Employee fraud yang paling umum adalah pemalsuan daftar gaji (*false payroll*), penjualan palsu (*false vendor*) dan transaksi cek palsu (*check kitting*).

Dalam hal ini, pemalsuan daftar gaji dilakukan dengan menciptakan karyawan palsu kemudian menguangkan gaji karyawan palsu tersebut. Pemalsuan penjualan dilakukan dengan membentuk penjual palsu, faktur palsu yang digunakan untuk menerima pembayaran. Sedangkan cek palsu melibatkan pemindahan dana dari bank yang satu ke bank yang lain dan mencatat secara tidak benar transfer tersebut. Sehubungan dengan *employee fraud*, **Alison (2004:2)** menyatakan bahwa:

“Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut.”

Adapun bentuk – bentuk *fraud* menurut **Tunggal (1992:30)**, *fraud* dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori:

1. Fraud yang merugikan perusahaan

Perusahaan merupakan korban fraud yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang menengah kebawah. Bentuk fraud dalam kategori ini misalnya pencurian harta kekayaan perusahaan

2. Fraud yang menguntungkan perusahaan

Fraud ini biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen puncak. Bentuk fraud dalam kategori ini misalnya ditemukan selisih lebih kas dari nasabah yang kelebihan setor secara tidak sengaja dan tidak diketahui identitas nasabah yang menyetorkan dan ketidaksengajaan petugas bank dalam menerima setoran tersebut sehingga menjadi pendapatan lain – lain cabang.”

2.2.5 Pendeteksian *Fraud*

Albrecht, dkk. (2012:77) mengatakan bahwa sebagian *fraud* dimulai dari jumlah kecil yang tidak signifikan, dan jika tidak ketahuan maka akan terus berlanjut ke jumlah yang lebih besar. Kejadian yang membuat pelaku merasa ketakutan atau terancam akan membuatnya menghentikan tindakan *fraud*, tapi nantinya *fraud* akan berlanjut lagi jika pelaku merasa keadaan sudah kembali aman. Apabila dalam suatu kasus *fraud* melibatkan manajemen puncak atau *owner*, pencegahan akan sulit dilakukan sehingga harus dilakukan pendeteksian *fraud* sejak dini. Tidak semua *fraud* dapat dicegah. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menerapkan pengendalian preventif untuk mencegah terjadinya *fraud* maupun pengendalian detektif untuk menghentikan *fraud* yang telah terjadi sebelum berkembang menjadi lebih parah.

Untuk mendeteksi *fraud* yang dilakukan oleh manajer dan karyawan, auditor internal harus mengetahui indikator *fraud* atau gejala (*red flags*) dan menyelidiki apakah gejala akibat *fraud* itu aktual atau disebabkan oleh faktor lain. Banyak *fraud* bisa terdeteksi lebih awal jika gejala *fraud* diselidiki. Gejala *fraud* dapat dipisahkan menjadi enam kelompok, yaitu anomali akuntansi, kelemahan pengendalian internal, gejala penipuan analitis, gaya hidup mewah, perilaku yang tidak biasa, serta tip dan keluhan (Albrecht, dkk., 2012:137). Berikut ini pendeteksian *fraud* berdasarkan penggolongan oleh ACFE yaitu.

1. *Financial statement fraud*

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud* dalam penyajian laporan keuangan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa metode tersebut.

- a. analisis vertikal yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau Laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan (Amrizal, 2004).
 - b. analisis horizontal yaitu teknik untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh adanya kenaikan penjualan sebesar 80% sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi illegal lainnya (Amrizal, 2004).
 - c. analisis rasio yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah *current ratio*, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut, (Amrizal, 2004).
2. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Teknik untuk mendeteksi *fraud* kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian *fraud* atas aset. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis daei bentuk *fraud* ini dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. Misalnya untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan menunjukkan anomali dan gejala penyimpangan yang dapat diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya *fraud*. Selain itu, metode-metode tersebut akan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan mengingatkan serta memberi peringatan pada auditor akan adanya potensi terjadinya *fraud* di masa mendatang (Amrizal, 2004).

3. *Corruption* (korupsi)

Sebagian besar *fraud* jenis ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (*red flag*) si penerima maupun si pemberi. Orang-orang yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana pada umumnya mempunyai karakteristik yaitu *the big spender*, *the gift taker*, dan *the odd couple*. Sedangkan orang yang melakukan pembayaran mempunyai karakteristik yaitu *the sleaze factor*, *the too succesful bidder*, *poor quality*, *higher prices*, dan *the one person operation* (Amrizal, 2004).

2.2.6 Pencegahan *Fraud*

Kasus *fraud* yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi Perusahaan. Apabila *fraud* tidak bisa dihentikan, maka akan berakibat fatal bagi Perusahaan. Untuk itu, manajemen Perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Menurut **Zabihollah Rezaee, Richard Riley (2005: 7)** :

“Pencegahan fraud adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku.”

Menurut **Peraturan Bank Indonesia dalam SE Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011** menyatakan: *“Pencegahan fraud merupakan pilar yang memuat perangkat-perangkat untuk ditujukan dalam mengurangi potensi terjadinya fraud.”*

Tiga faktor kondisi kecurangan yang dikenal sebagai *Fraud Triangle* yaitu pendorong/paksaan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan sikap/rasionalisasi (*rationalization*) menurut **Theodorus M Tuannakota (2007:106)**. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pendorong/Paksaan (*Pressure*).

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Konsep yang penting disini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa

kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain.

2. Kesempatan (*Opportunity*).

Kondisi yang mendesak menyediakan peluang bagi manajemen atau para karyawan untuk melakukan penipuan.

3. Sikap/Rasionalisasi (*Rationalization*).

Sikap, karakter atau kesatuan nilai-nilai etis yang ada, itu mengizinkan manajemen atau para karyawan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak jujur, atau mereka ada dalam suatu lingkungan yang cukup menekan yang menyebabkan mereka untuk yang merasionalkan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak jujur.

Dari tiga kondisi kecurangan tersebut maka pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan.

Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh Perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* karena setiap tindakan *fraud* dapat dicegah dengan cepat dan diantisipasi baik oleh Perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak.

2.2.7 Metode Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud*

Adanya penerapan *Good Corporate Governance* membuat sejumlah perusahaan mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pendeteksian dan pencegahan *fraud*. Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada Audit Internal untuk mendeteksi dan mencegah *fraud* yang mungkin terjadi dalam lingkungan organisasi. Apabila teknik pendeteksian dan pencegahan *fraud* berjalan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi perusahaan karena meningkatnya kepercayaan publik. *Fraud* merupakan suatu masalah di dalam Perusahaan dan harus dicegah sedini mungkin. Cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud* yang di dasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut Perusahaan.

Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pendeteksian dan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan Bank, antara lain melalui penerapan manajemen risiko khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pendeteksian dan pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Bank pada seluruh aspek organisasi, baik oleh manajemen maupun karyawan. Efektifitas pengendalian *Fraud* dalam bisnis proses merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *Fraud* pada Bank.

Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Sesuai dengan **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011** mengemukakan penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum dengan aspek-aspek yang fokus pada pendeteksian dan pencegahan *Fraud* yaitu diantaranya adalah :

1. *Anti Fraud Awareness*

Anti Fraud awareness adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan anti *fraud awareness* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank terhadap pengendalian *fraud*. Moral dan *awareness* dari pimpinan terhadap anti *fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkannya.

Upaya untuk menumbuhkan anti *fraud awareness* dilakukan antara lain melalui:

a) Penyusunan dan sosialisasi *Anti Fraud Statement*.

Contohnya kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud*.

b) Program *employee awareness*.

Contohnya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait anti *fraud*, training, dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk-bentuk

fraud, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.

c) Program *customer awareness*.

Contohnya pembuatan brosur anti *fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.

2. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*. Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Bank wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.

Dalam hal penerapan indentifikasi kerawanan maka dapat dijelaskan beberapa hal tentang :

a) Mengidentifikasi potensi risiko *fraud*

Memprediksi potensi skema dan skenario kecurangan, termasuk faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya *fraud*.

b) Menganalisis potensi risiko *fraud*

Melakukan asesmen risiko pada tingkat perusahaan, tingkat unit usaha atau bagian yang signifikan, serta pada tingkat akun yang signifikan.

c) Menilai potensi risiko *fraud*

Melakukan asesmen terhadap potensi terjadinya pelanggaran oleh manajemen (*management override*) dan tingkat keterlibatan personalia yang relevan dengan masing-masing jenis risiko.

d) Hasil dokumentasi dan informasi

Mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan daerah yang berpotensi risiko terjadinya *fraud* dan melaporkan hasilnya secara internal kepada pihak manajemen atau divisi terkait maupun Bank Indonesia.

e) Pengkinian aktivitas berisiko tinggi terjadinya *fraud*

Melakukan asesmen atas potensi terjadinya risiko yang berisiko tinggi dengan cara mengevaluasi aktifitas dan efektifitas sistem pengendalian internal yang ada.

3. *Know Your Employee*

Know Your Employee adalah suatu bentuk upaya pemedeteksian dan pencegahan terjadinya *fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan *know your employee* yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:

- a) Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat;
- b) Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan.

Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan

- c) Kebijakan “mengenali karyawan” (*know your employee*) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

Strategi anti *Fraud* adalah strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *Fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Keberhasilan strategi anti *Fraud* dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan dengan baik dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan penerapan metode strategi anti *fraud* bagi bank umum dengan aspek-aspek yang fokus pada pencegahan *Fraud* yaitu :

1. *Anti Fraud Awareness*
2. Identifikasi Kerawanan
3. *Know Your Employee*

2.2.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian mengenai masalah ini, diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Perbankan Pekanbaru) Theresa Festi T (2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan yang diterapkan pada Perbankan di Pekanbaru. Hal ini dilihat hasil uji hipotesis yang menyatakan berpengaruh yaitu dilihat dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan t_{hitung} sebesar 6,695 lebih besar daripada t_{tabel} sebesar 2,010 maka H_a diterima dan H_o ditolak.	Perbedaan : Penelitian dilakukan pada beberapa perusahaan perbankan yang berbeda dengan objek yang luas. Persamaan : Penelitian dilakukan dalam bidang audit internal pada perusahaan jasa yaitu Perbankan serta hipotesis yang digunakan sama-sama menggunakan hipotesis deskriptif

			dan asosiatif.
2	<p>Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian <i>Fraud</i> (Suatu Studi pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Barat)</p> <p>Ratna Amalia (2013)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian <i>fraud</i> yang diterapkan pada GKPRI Jabar. Hal ini dilihat dari nilai koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa pengaruh audit internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> adalah 87,7% sedangkan sisanya 12,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model serta hasil uji hipotesis yang menyatakan berpengaruh yaitu dilihat dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak.</p>	<p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian dilakukan dalam bidang audit internal pada perusahaan yang berbeda yaitu organisasi pemerintah dengan perusahaan perbankan.</p> <p>Persamaan :</p> <p>Hipotesis yang digunakan sama-sama menggunakan hipotesis deskriptif dan asosiatif.</p>
3	<p>Peranan Audit Internal Dalam Mencegah Kecurangan (Studi Kasus pada PT Bank Tabungan Pensiun</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal dalam mencegah kecurangan yang</p>	<p>Perbedaan :</p> <p>Pengambilan indikator sumber dalam variabel dependent yang</p>

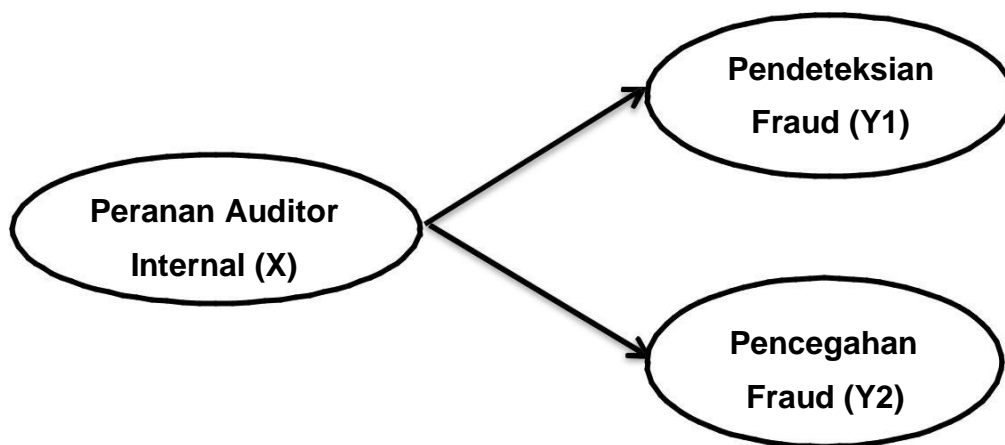
	<p>Nasional, Tbk)</p> <p>Rima Mayasari (2010)</p>	<p>diterapkan pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk berjalan efektif. Hal ini dilihat dari hasil uji analisis statistik bahwa variabel independen dan dependen diperoleh angka sebesar 92% yang diukur dalam skor interval persentasi 76%-100% dinyatakan sangat berperan.</p>	<p>dipakai berbeda.</p> <p>Persamaan :</p> <p>Penelitian dilakukan dalam bidang audit internal pada perusahaan jasa yaitu Perbankan serta variabel independen dan dependen yang sama.</p>
--	---	--	---

Sumber : Data diolah

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah pustaka serta beberapa peneltian terdahulu yang digunakan sebagai acuan yang untuk pengembangan penelitian ini, maka penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh peranan auditor internal dalam melakukan pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, agar lebih mudah untuk memahami hal tersebut maka diperlukan suatu kerangka pemikiran, sebagai berikut.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah *integrity risk* yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau karyawan, tindakan ilegal atau tindakan penyimpangan lain yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia perusahaan, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Adanya resiko tersebut mengharuskan Audit Internal cabang dalam kinerja auditnya untuk mendeteksi tindakan kecurangan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Audit Internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Audit Internal memainkan peran yang penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif. Audit Internal akan membantu mencegah *fraud* dengan memeriksa dan mengevaluasi pengendalian

internal yang mengurangi risiko *fraud*. Mereka akan membantu mendeteksi *fraud* dengan melaksanakan prosedur audit yang dapat mengungkapkan kegiatan yang bersifat curang serta penyalahgunaan aset. Berdasarkan hal di atas maka akan sangat dibutuhkan peranan auditor internal sebagai pihak independen di perusahaan untuk melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya *fraud*. Namun, meskipun pihak auditor internal sudah melakukan tindakan pencegahan *fraud* di perusahaan, itu tidak akan menjamin perusahaan akan terbebas sepenuhnya dari *fraud*.

Tindakan pencegahan tidak akan sepenuhnya menghapus peluang-peluang untuk melakukan *fraud*. Pihak operasional perusahaan yang ingin melakukan *fraud* akan terus mencari peluang yang ada serta memanfaatkannya untuk melakukan *fraud* dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah.

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara audit internal terhadap pendeteksian *fraud* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.”

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut **Sugiyono (2009:2)** menyatakan bahwa :

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.”

Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang disebut metode. Metode penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai cara-cara atau prosedur-prosedur yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai hasil yang baik seperti yang dikehendaki.

3.1.1 Objek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK

Kantor Wilayah Pusat bertempat di Jl. Tanjung Duren Raya no 7 ABC Grogol Petamburan Jakarta Barat. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Audit Internal Terhadap Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud* pada PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK Kantor Wilayah Pusat .

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut **Silohun (2001:85)** mengemukakan bahwa :

“Ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan”.

Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif dan asosiatif, karena ada variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk kemudian disajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti. Menurut **Sugiyono (2012:97)** menyatakan bahwa :

“Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih”.

Dalam penelitian ini, hipotesis deskriptif akan digunakan untuk mengidentifikasi/menjelaskan tentang pengaruh audit internal terhadap pendeteksian dan pencegahan *fraud*.

Sedangkan yang dimaksud hipotesis asosiatif menurut **Sugiyono (2012:100)** adalah “*Jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih*”. Hipotesis ini tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, dengan tujuan untuk dapat menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis keadaan yang ada pada perusahaan.

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel berkenaan dengan apa yang akan diteliti. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberikan berbagai macam nilai dan merupakan mediator antara konstruk yang bersifat abstrak dengan fenomena nyata yang ada. Variabel dapat diukur dengan berbagai macam nilai tergantung pada konstruk yang diwakilinya.

Menurut **Sugiyono (2009:31)** menyatakan bahwa :

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh suatu informasi tentang hal tersebut, kemudian menarik suatu kesimpulan.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Sesuai dengan judul yang diungkapkan yaitu “Pengaruh Audit Internal Terhadap Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud*”. Maka terdapat 1 (satu) variabel

Independen dan 2 (dua) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini.

Variabel-variabel tersebut adalah :

1. Variabel independen

1.1 Audit Internal (Variabel X)

Variabel Independen (Variabel Bebas) dalam penelitian ini adalah Audit Internal. Audit Internal menurut **Hiro Tugiman (2006:11)** dalam bukunya standar professional audit internal : *“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”*.

Auditor internal merupakan auditor yang bekerja pada suatu entitas (perusahaan) dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada entitas tersebut. Tugas audit yang dilakukannya terutama ditujukan untuk membantu manajemen entitas tempat di mana ia bekerja (Jusup, 2014:18). Dalam membantu manajemen auditor internal menjalankan tanggung jawabnya untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektifitas kinerja perusahaan. Auditor internal memiliki peranan yang sangat penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usaha (Sawyer, dkk., 2003:7).

Auditor internal juga bertanggungjawab untuk menilai kecukupan dan keefektifan dari masing-masing sistem pengendalian yang memberikan jaminan kualitas dan integritas dari proses pelaporan keuangan (Dana, dkk. 2008) dalam (Yuniarti, dkk. 2012).

Variabel peranan auditor internal dalam penelitian ini akan diteliti menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2008). Pertanyaan dalam kuesioner tersebut ditujukan untuk meneliti independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang digunakan sebagai indikator dalam pengukuran variabel peranan auditor internal. Dalam melakukan pengukuran variabel peranan auditor internal akan digunakan skala pengukuran yaitu skala *likert* lima *point* dengan rincian sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju (2) tidak setuju (3) netral (4) setuju (5) sangat setuju.

2. Variabel Dependen

2.1 Pendeteksian *fraud*

Albrecht, dkk. (2012:77) mengatakan bahwa sebagian *fraud* dimulai dari jumlah kecil yang tidak signifikan, dan jika tidak ketahuan maka akan terus berlanjut ke jumlah yang lebih besar. Kejadian yang membuat pelaku merasa ketakutan atau terancam akan membuatnya menghentikan tindakan *fraud*, tapi nantinya *fraud* akan berlanjut lagi jika pelaku merasa keadaan sudah kembali aman. Apabila dalam suatu kasus *fraud* melibatkan manajemen puncak atau *owner*, pencegahan akan sulit dilakukan sehingga harus dilakukan pendeteksian *fraud* sejak dini. Tidak semua *fraud* dapat dicegah. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menerapkan pengendalian preventif untuk mencegah terjadinya *fraud*, maupun pengendalian detektif untuk menghentikan tindakan *fraud* yang telah terjadi sebelum berkembang menjadi lebih parah. Untuk mendeteksi *fraud* yang

dilakukan oleh manajer dan karyawan, auditor internal harus mengetahui indikator *fraud* ini atau gejala (*red flags*) dan menyelidiki apakah gejala akibat *fraud* itu aktual atau disebabkan oleh faktor lain. Banyak *fraud* bisa terdeteksi lebih awal jika gejala *fraud* diselidiki. Albrecht, dkk. (2012:137) mengatakan gejala *fraud* dapat dipisahkan menjadi enam kelompok, yaitu anomali akuntansi, kelemahan pengendalian internal, gejala penipuan analitis, gaya hidup mewah, perilaku yang tidak biasa, dan tip dan keluhan.

Variabel pendeteksian *fraud* dalam penelitian ini akan diteliti menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2015). Pertanyaan dalam kuesioner tersebut ditujukan untuk meneliti audit berbasis risiko, *audit intelligence*, dan prosedur mendekteksi *fraud* secara otomatis dalam sistem yang akan digunakan sebagai indikator dalam pengukuran variabel pencegahan *fraud*. Dalam melakukan pengukuran variabel pendeteksian *fraud* akan digunakan skala pengukuran yaitu skala *likert* lima *point* dengan rincian sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju (2) tidak setuju (3) netral (4) setuju (5) sangat setuju.

2.2 Pencegahan Fraud

Albrecht, dkk. (2012:103) berpendapat bahwa suatu organisasi dapat menciptakan lingkungan dengan tingkat *fraud* yang rendah dan tingkat *fraud* yang tinggi. Untuk menciptakan lingkungan dengan tingkat *fraud* yang rendah dan sangat baik untuk pencegahan terjadinya *fraud*, ada 2 (dua) faktor dasar yang diperlukan yaitu:

1. Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan memberi dukungan
Terdapat 3 (tiga) faktor utama dalam pencegahan *fraud* yang berkaitan dengan menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan. Berikut ketiga faktor tersebut.

- a. Mempekerjakan orang yang jujur dan menyediakan pelatihan kesadaran
- b. Menciptakan lingkungan kerja yang positif
- c. Mengimplementasikan program dukungan untuk pegawai (*Employee Assistance Programs-EAP*)

2. Mengeliminasi kesempatan terjadinya kecurangan

Terdapat 5 (lima) metode dalam mengeliminasi kesempatan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan *fraud*. Berikut pemaparan mengenai kelima metode tersebut :

- a. Memiliki pengendalian internal yang baik.
- b. Memperkecil kerjasama di antara pegawai dan pelanggan atau pemasok dan menginformasikan secara jelas kepada pemasok dan pihak lain di luar perusahaan mengenai kebijakan perusahaan terkait *fraud*.
- c. Mengawasi pegawai dan menyediakan *whistleblowing system*
- d. Membuat ekspektasi hukuman
- e. Melakukan tahapan auditing secara proaktif

Dalam melakukan pengukuran variabel pencegahan *fraud* akan digunakan skala pengukuran yaitu skala *likert* lima *point* dengan rincian sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju (2) tidak setuju (3) netral (4) setuju (5) sangat setuju.

3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang ditentukan melalui suatu kriteria tertentu dan yang dapat dikategorikan ke dalam objek tersebut bisa termasuk orang, file, atau dokumen yang dapat dipandang sebagai objek penelitian.

Menurut **Sugiyono (2009:115)** menyatakan bahwa “*Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya*”. Sedangkan menurut **Sanusi (2011:87)** “*Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan*”. Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kesimpulan itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai Audit Internal Kantor Wilayah Pusat yaitu berjumlah 34 responden.

2. Sampel

Menurut **Sanusi (2011:87)** “*Bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih disebut sampel*”. Penulis menggunakan teknik sampling jenuh yang merupakan bagian dari *Nonprobability Sampling*. Menurut **Sugiyono (2009:120)** “*Nonprobability Sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel*”.

Teknik sampling jenuh menurut **Sugiyono (2009:122)** adalah “*teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel*”. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Pada penelitian ini, penulis mengambil semua jumlah populasi yang ada untuk menyebarkan kuesioner kepada pegawai audit internal yang berjumlah 34 responden.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengertian data primer menurut **sugiyono (2012:193)** adalah: “*Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data*”. Data yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menguji hipotesis adalah data yang diperoleh langsung dari subyek yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data-data untuk bahan penelitian adalah dengan metode penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan langsung atas aktivitas yang dilaksanakan oleh objek penelitian.

Teknik pengumpulan data menurut **Suharsimi Arikunto (2006)** adalah *“mengamati variabel yang akan diteliti dengan beberapa metode diantaranya adalah interview, tes observasi, kuesioner dan sebagainya”*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuisisioner (angket) yang merupakan data primer, yaitu suatu alat atau instrumen untuk menyelidiki suatu masalah yang pada umumnya menyangkut kepentingan umum, dilakukan dengan jalan mengedarkan suatu daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan. Kuesioner ini ditujukan kepada para pegawai Audit Internal Kantor Wilayah Pusat

3.3 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.3.1 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan alat-alat bantu, berupa dasar-dasar teori yang telah dipelajari sebelumnya. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek yang diteliti, dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Untuk melakukan pengujiannya diperlukan serangkaian langkah

yang akan dimulai dari operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, penentuan populasi dan sampel, serta metode analisis dan rancangan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif guna untuk mendapatkan data penelitian.

Dalam menguji instrumen penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan Angket (kuesioner) dalam pengumpulan data, dimana untuk dapat mengetahui apakah data yang dihasilkan oleh alat ukur tersebut dapat menjamin mutu dari penelitian sehingga kesimpulan atau alasan yang dikemukakan terhadap hubungan antara variabel satu dengan lainnya dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan sehingga hasil penelitian dapat diterima.

Data hasil kuesioner yang baik adalah data yang didapat dari alat ukur yang baik. Kuesioner yang baik harus memenuhi syarat sebagaimana berikut ini:

- 1. Validitas**
- 2. Realibilitas**

Jika validitas dan realibilitas tidak diketahui, maka akibatnya menjadi fatal dalam memberikan kesimpulan ataupun memberi alasan terhadap hubungan-hubungan antara variabel, bahkan secara luas validitas dan realibilitas mencakup mutu seluruh proses pengambilan data sejak konsep disiapkan sampai data siap untuk dianalisis.

1. Pengujian Validitas

Pengujian validitas data bertujuan untuk memastikan apakah semua data tersebut telah mengukur segalanya dengan tepat, atau dengan kata lain data

tersebut mengungkapkan sesuatu yang menjadi susunan pokok pengukuran dengan instrumen tersebut. Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dan variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel sebagaimana yang kita inginkan. Apabila pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat, maka pertanyaan tersebut tidak akan dianalisis lebih lanjut.

Untuk menentukan apakah item kuesioner valid, dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi *Product-Moment Pearson* yaitu menghitung koefisien korelasi (r) *Pearson* antara skor pernyataan masing-masing item (sebagai variabel x) dengan skor total yang dihasilkan oleh setiap responden untuk item yang bersangkutan (sebagai variabel y). Pengujian validitas ini menggunakan fasilitas dalam program SPSS 15.0 *for windows*.

Menurut **Sugiyono (2012:172)** bahwa “*Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur*”. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan setiap skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap butir skor. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Menurut **Sugiyono (2012:172)** syarat yang harus dipenuhi memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $r = 0.30$ atau diatas 0.30 , maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid.
- b. Jika $r \neq 0.30$ atau dibawah 0.30 , maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid.

2. Pengujian Realibilitas

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*reliable*). Tingkat reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *Cronbach alpha*. *Cronbach alpha* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik *item* dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. *Cronbach alpha* dihitung dalam hal rata-rata antarkorelasi *interitem* yang mengukur konsep. Semakin dekat *Cronbach alpha* dengan 1, maka semakin tinggi keandalan konsistensi internal. Secara umum, nilai *Cronbach alpha* kurang dari 0,6 dianggap buruk, dalam kisaran 0,7 dinilai bisa diterima dan diatas 0,8 dianggap baik. Oleh karena itu, batasan *Cronbach alpha* yang dipakai oleh peneliti adalah $\geq 0,6$. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 15.0 *for windows*.

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

3.3.2.1 Pengujian Normalitas

Uji normalitas merupakan uji dimana data variabel bebas (independen) dan data variabel terikat (dependen) pada persamaan regresi berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas (independen) dan data variabel terikat (dependen) berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05* maka data residual terdistribusi tidak normal. Hal ini berlaku sebaliknya, yaitu jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05* maka data residual terdistribusi normal (Ghozali, 2011:160).

3.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang menghindari atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang paling umum digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatterplot* antara nilai prediksi variabel

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPREID (Ghozali, 2011:139).

3.3.2.3 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011: 110). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu ukuran untuk menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan nilai DW berada dikisaran 1 dan +3 atau $1 \leq DW \leq 3$ (Sufren, 2013:109).

3.3.2.4 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis korelasi regresi linier sederhana merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan variabel independen dan variabel dependen dan memprediksi nilai Y berdasarkan suatu nilai X tertentu, dengan menggunakan persamaan.

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Dimana:

Y_1 = pendeteksian *fraud*

Y_2 = pencegahan *fraud*

α = konstanta

β = angka koefisien regresi

X= peranan auditor internal

e = error

3.3.2.5 Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2011:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Salah satu cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan baik kritis menurut tabel. Sugiyono (2011:194) uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat.

Untuk menguji apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial dengan $\alpha = 0,05$. Adapun ketentuannya adalah.

- a. Jika nilai t hitung $\leq t$ tabel maka tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai t hitung $> t$ tabel maka ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat

3.3.2.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasan (2005:53) menyatakan bahwa “Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen”. Hasil F-test ini pada *output* SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA. Hasil F-test menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, jika *p value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan atau F hitung lebih besar dari F tabel. Dalam penelitian ini digunakan *level of significant* sebesar 0,05. Adapun ketentuannya adalah.

- a. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau ($0,05 < \text{sig}$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan (tidak ada pengaruh yang nyata).
- b. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig atau ($0,05 > \text{sig}$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan (ada pengaruh yang nyata).

3.3.2.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independensi memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 197).

3.3.2.8 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel X dan Y dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_o: \beta \leq 0$ Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank MUAMALAT INDONESIA, Tbk.

$H_a: \beta > 0$ Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank MUAMALAT INDONESIA, Tbk.

3.4 Rancangan Kuesioner

Menurut **Sugiyono (2009:199)**, "*Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya*".

Peneliti menggunakan jenis kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang dibagikan telah disediakan pilihan jawaban sehingga responden hanya dengan memilih. Kuesioner dibagikan kepada 34 (tiga puluh) responden.

Kuesioner terdiri dari 26 (dua puluh enam) pertanyaan yaitu 11 (sebelas) pertanyaan untuk variabel X (Audit Internal), 5 (lima) pertanyaan untuk variabel Y_1 (Pedeteksian *Fraud*) dan 10 (sepuluh) pertanyaan untuk variabel Y_2 (Pencegahan *Fraud*).